

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini, masyarakat senantiasa memerlukan organisasi pemerintahan sebagai salah satu fungsi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan umum pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia telah membangun komitmen yang kuat untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan modern.

Lingkup perubahan yang terjadi sangat mendasar dan bersifat menyeluruh, termasuk didalamnya Pengelolaan Aset Daerah. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi, sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. *International Best Practice* memperlihatkan peran strategis Pengelolaan Aset Negara/Daerah sebagai salah satu indikator penting dalam Pengelolaan Aset Daerah dan upaya dalam mewujudkan akuntabilitas tata kelola suatu keuangan negara/daerah.

Diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini menjadi titik perubahan paradigma pengelolaan aset negara. Hal ini diikuti dengan pembentukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi kelembagaan untuk mengelola kekayaan negara/daerah, guna mendorong



optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas Pengelolaan Aset Negara/Daerah.

Sebagai pedoman pengelolaan aset negara, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai dasar hukum pengelolaan barang milik daerah selama ini masih banyak kekurangan.

Beberapa kekurangan tersebut diantaranya adalah belum adanya aturan khusus mengenai pengelolaan barang milik daerah yang meliputi sewa barang milik negara/daerah, kerja sama pemanfaatan, maupun barang milik negara yang terletak diluar negeri. Selain itu, masih terdapat multitafsir terutama dalam hal Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tidak sesuai dengan dinamika Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sekarang. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan atas peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Hal ini juga didukung oleh temuan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) serta adanya kasus-kasus kecurangan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah, pertanggung jawaban atas barang milik daerah menjadi sangat penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan.



Berdasarkan uraian diatas, maka dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini penulis memilih judul **“MEKANISME PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA KANTOR BPKA KOTA PADANG.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian tersebut diatas, maka pokok-pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor BPKA Kota Padang?
2. Bagaimana Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada Kantor BPKA Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui secara langsung keadaan dilapangan, yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor BPKA Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendapatan BPKA Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari pelaksanaan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, manfaat tersebut antara lain :

1. Bagi penulis
Bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai Mekanisme Pengelolaan Aset Daerah.
2. Bagi instansi



Diharapkan dapat menjadi masukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan atas Mekanisme Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor BPKA Kota Padang.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi khususnya untuk menambah pengetahuannya dan mengkaji masalah-masalah terkait Mekanisme Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor BPKA Kota Padang.

1.5 Metode Penulisan

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode yang dijadikan sarana mencari informasi berkaitan dengan pokok bahasan. Metode yang digunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai literature, buku yang berhubungan dengan topik pembahasan laporan tugas akhir ini.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan peninjauan secara langsung ke instansi terkait agar memperoleh data yang diperlukan, serta mempelajari dan menganalisa data yang berkaitan dengan objek penulisan tersebut. Metode ini dilakukan dengan cara melaksanakan magang di kantor BPKA Kota Padang.

3. Pencarian Data Melalui Internet



Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait. Dengan mengunjungi website dapat memberikan masukan bagi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan.

1.5.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang Mekanisme Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor BPKA Kota Padang. Deskriptif data diperoleh dari hasil penelitian, analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran data secara umum dan kecenderungan data yang digunakan adalah :

1. Data kuantitatif

Metode analisa dilakukan secara bersamaan pada saat memperoleh data, metode ini diperlukan sebagai pembandingan data yang di peroleh.

2. Data Kualitatif

Metode analisa data ini berkaitan dengan data instansi yang berupa data non angka kemudian di analisis dan mendapatkan kesimpulan penulisan.



